

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam dinamika global yang dipenuhi tantangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan ketegangan geopolitik yang mengancam rantai pasok pangan dunia. Di tingkat nasional, perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan pergeseran pola konsumsi turut memengaruhi pola makan masyarakat. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus mencakup tidak hanya ketersediaan, tetapi juga akses yang merata dan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dicapai melalui produksi mandiri, distribusi adil, serta regulasi yang menjamin keamanan dan keberlanjutan pangan demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif.¹

Sektor pertanian punya peran sentral dalam ketahanan pangan. Pertanian bukan hanya sebagai penyedia bahan pangan, tapi juga jadi tulang punggung ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan jadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Namun, di balik perannya yang besar, sektor ini menghadapi tantangan serius.²

Petani sebagai pelaku utama dalam rantai produksi pangan sering kali berada di posisi yang paling rentan menghadapi tantangan yang serius. Banyak petani berkerja dengan skala kecil, modal terbatas, dan akses yang minim

¹ Meta Mahendradatta et al., *Ketahanan dan Keamanan Pangan Indonesia: Sekarang dan ke Depan* (Yogyakarta: Interlude bekerja sama dengan PATPI, 2020), 3-5.

² Nugroho, H., & Rachmawati, "Ketahanan Pangan dan Peran Petani di Era Modern". *Jurnal Pembangunan Pertanian*, Volume 17, Nomer 2, (2019), 123-132.

terhadap input penting seperti benih unggul, pupuk, hingga teknologi pertanian modern.³ Selain itu, fluktuasi harga hasil panen yang tidak menentu bikin pendapatan mereka tidak stabil, bahkan kadang merugi. Belum lagi soal ketergantungan pada musim, keterbatasan irigasi, serta minimnya akses terhadap pembiayaan dan pasar.⁴

Kondisi ini menandakan perlunya perhatian lebih terhadap penguatan peran petani. Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa keberlanjutan kesejahteraan petani. Dukungan berupa akses permohonan, infrastruktur pertanian, stabilitas harga, dan pendampingan teknologi jadi hal yang mendesak. Pembangunan pertanian yang berpihak pada petani bukan soal kebijakan, tapi juga soal masa depan bangsa.⁵

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam negara agraris, Indonesia masuk ke dalam negara agraris kedua di dunia setelah Brazil.⁶ Salah satu alasannya adalah Indonesia sebagai produsen utama pangan seperti, padi, kedelai, kelapa sawit, dan jagung. Oleh sebab itu sebagian besar warga di Indonesia memilih berkerja sebagai petani dan buruh tani dalam mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup, Selain itu kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga didukung oleh sektor pertanian yang merupakan salah satu dari sektor pendukung lainnya. Sektor pertanian berperan sangat andil dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, *profitability* yang diberikan dari

³ Astuti, D., & Hidayat, R. "Tantangan Ketahanan Pangan Nasional: Antara Produksi dan Distribusi", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 21, Nomer 1, (2020). 45-48.

⁴ Santoso, B., "Peran Petani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan", *Agro Ekonomi*, Volume 33, Nomer 1, (2022), 14-28.

⁵ Setyawan, D., & Lestari, W., "Ketimpangan Rantai Nilai Pertanian: Perspektif Petani Kecil", *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Volume 19, Nomer 2, 65-81.

⁶ Ananda, A. N., Azzahra, T. S., Susanti, W., & Wikansari, R, "Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia Pada Pasar Internasional", *Jurnal Ilmu Pertanian*, Volume 7, Nomer 1, (2023), 128-135.

sektor pertanian adalah hal yang cukup besar dalam menjaga pangan di Indonesia.⁷ Diluar itu sektor pertanian adalah harapan bagi para petani, dengan bertani para petani bisa menyambung hidup bahkan banyak petani yang sangat bergantung karena hanya bertani saja sumber pemasukannya.⁸

Petani adalah simbol dalam putaran sektor pertanian tersebut, oleh sebab itu perhatian khusus kepada para petani harus dilakukan pemerintah guna untuk memajukan sektor pertanian, pemerintah dapat memberikan kebijakan dan dari kebijakan tersebut bisa menjadi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan.⁹ Adapun Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memprioritaskan hal-hal atau kebutuhan inti bagi para petani misalnya adalah peningkatan harga pasar, pelatihan, Pendidikan, akses kredit pertanian dan subsidi pupuk.¹⁰

Pupuk merupakan salah satu input utama dalam kegiatan pertanian yang berperan besar dalam meningkatkan produktivitas lahan serta kualitas hasil panen. Peningkatan produktivitas pertanian sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan pupuk secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara konsisten menyediakan program pupuk bersubsidi untuk mendukung petani, khususnya petani kecil, agar tetap mampu berproduksi

⁷ Safitri, M. G., Agustin, M., Syahroni, I., & Kurniati, E, "Peran sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk pemberdayaan ekonomi di Pulau Sumatera", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), (2025), 195-204.

⁸ Mi'rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan", *Jurnal Agristan*, Volume 2, Nomor 1 (Mei 2020), 53.

⁹ Hidayat, A. O., Ayu, I. W., & Wildan, M, "Kajian Literatur: Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pertanian Untuk Kesejahteraan Ekonomi Petani", *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, 7(1), (2024), 241-245.

¹⁰ Ivan Nugraha, Muhammad Rafli Firdausi, Muhammad Adymas MHaikal, "Kontribusi Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria", *Jurnal Of Multidisciplinary Inquiry in Science*, Vol. 2, No. 1 (2024), 440-447.

secara optimal meski dengan keterbatasan daya beli.¹¹

Namun dalam implementasinya, akses petani terhadap pupuk bersubsidi masih diwarnai berbagai persoalan yang kompleks, kelangkaan pupuk bersubsidi sering kali terjadi, terutama menjelang musim tanam yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam proses produksi pertanian. Penyaluran pupuk yang tidak merata antara menjadi salah satu penyebab utama dari persoalan ini. Di berbagai wilayah, petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Bahkan praktik penylewangan distribusi oleh oknum tertentu turut memperburuk keadaan. Menjadikan pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya.¹²

Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi mencerminkan lemahnya daya beli petani terhadap pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal, ketergantungan ini menjadi resiko tersendiri apabila pasokan pupuk bersubsidi terganggu dikarenakan petani tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan lahannya. Situasi ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan potensi kerugian secara ekonomi bagi petani. Oleh karena itu, permasalahan akses terhadap pupuk, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun ketepatan sasaran perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan pertanian nasional yang adil dan berkelanjutan.¹³

¹¹ Badan Pusat Statistik, “Statistik Pertanian Indonesia 2023”, Jakarta: BPS.

¹² Supriyadi, H., “Masalah Distribusi dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Indonesia”, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Volume 8, Nomer 1, 23-34.

¹³ Yuliana, R., “Analisis Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Grobogan”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Volume 11, Nomer 3, 188-197.

Pemberian zat hara ke tanaman atau bisa dikenal dengan pemberian pupuk merupakan media yang familiar dalam petani. Pemberian pupuk atau pemupukan adalah aktivitas yang dilakukan para petani guna menjadikan tanaman yang memiliki kualitas dan kuantitas. Oleh sebab itu, keberhasilan para petani sangat bergantung pada hasil dari panen, keberhasilan dan kegagalan para petani bisa diukur dari hasil tersebut. Dalam hal itu, pemerintah sangat diharapkan bisa berkontribusi dengan baik dan memperhatikan secara khusus kepada para petani dengan menjadi fasilitas terbaik yang bisa memudahkan dan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan para petani yang secara tidak langsung juga menjaga ketahanan pangan di dalam negeri untuk meminimalisir atau mencegah krisis pangan.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pemerintah telah merancang dan menerapkan berbagai kebijakan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kebijakan pemberian subsidi pupuk kepada para petani. Kebijakan subsidi pupuk dapat juga diartikan bahwa pemerintah berusaha membantu meringankan beban pembiayaan petani, dengan tetap mendorong peningkatan produksinya. Dengan demikian, melalui kebijakan subsidi pupuk petani diharapkan dapat berusahatani dengan baik dengan capaian produksi padi (beras) yang meningkat dan juga diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani bisa meningkat.¹⁴

Pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan syarat dan ketentuan tertentu, terutama bagi mereka yang terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Melalui mekanisme ini, pupuk bersubsidi

¹⁴ Abdul Halim, Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi: *Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 2-3

didistribusikan ke petani dengan bantuan lembaga penyalur resmi, seperti kios pupuk dan kelompok tani di tingkat desa. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pupuk sampai kepada penerima manfaat yang berhak, sesuai dengan alokasi yang telah ditentulkan.¹⁵

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti keterlambatan distribusi, kurangnya pengawasan terhadap lembaga peyalur, serta potensi penyimpangan dalam proses penyaluran masih sering terjadi. Kondisi ini menghambat tujuan utama dari kebijakan tersebut, yakni meningkatkan kesejahteraan petani.¹⁶

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, terutama pada tingkat distribusi dan efektivitas peran lembaga penyalur di desa. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertanian nasional dan kesejahteraan petani.¹⁷

Kebutuhan pupuk pada sektor pertanian akan selalu naik seiring dengan meningkatkannya kebutuhan pangan di negara Indonesia yang semakin tahun jumlah jiwa yang semakin banyak dan meluap. Oleh sebab itu, jaminan tentang pupuk bersubsidi kepada para petani harus di perhatikan apalagi terkait ketersediaannya baik dari lokal atau luar negeri. Kebijakan penyaluran pupuk

¹⁵ Nuraini, D., "Peran Kelembagaan Penyalur Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi di Pedesaan", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Volume 8. Nomer 3, 243-251.

¹⁶ Wibowo, T., S., & Prasetyo, A., D., "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 9, Nomer 2, 101-110.

¹⁷ Mulyadi, H., "Strategi Pemerintah Dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani", *Jurnal Agraria*, Volume 5, Nomer 1. 67-76.

bersubsidi sudah sejak dulu untuk memberikan jaminan pada sektor pertanian.¹⁸

Undang-Undang nomor 47 tahun 2018 mengenai jatah dan HET pupuk bersubsidi yang menetapkan bahwa pupuk bersubsidi diberikan kepada anggota kelompok tani yang sudah mengajukan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK). Maka dari itu dijelaskan bahwa kelompok tani atau petani yang memiliki hak dalam menerima pupuk bersubsidi adalah yang sudah mengajukan rencana RDKK tersebut, dengan adanya aturan tersebut maka secara tidak langsung penyaluran pupuk bersubsidi akan bersifat terbuka dan terhindarnya ketidak inginan kegagalan atau mekanisme yang diluar kebijakan seperti monopoli.

Penyaluran subsidi pupuk sudah di salurkan di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah daerah yang akan dijadikan objek penelitian yang terletak di Kabupaten Lamongan Kecamatan Sambeng. Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari provinsi Jawa timur. Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten pemasok padi terbesar di provinsi Jawa Timur. Lamongan memiliki 27 Kecamatan dan 476 Desa. Dari 27 kecamatan. Dari 27 kecamatan, Kecamatan Sambeng merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah 19.544,00 kilometer persegi yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Lamongan dengan 22 Desa dan 86 Dusun. Adapun data luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

¹⁸ Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 95

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Sukorame	4.147,00
2	Blubuk	5.415,00
3	Ngimbang	11.433,00
4	Sambeng	19.544,00
5	Mantup	9.307,00
6	Kembangbahu	6.384,00
7	Sugio	9.129,00
8	Kedungpring	8.443,00
9	Modo	7.780,00
10	Babat	6.295,00
11	Pucuk	4.484,00
12	Sukodadi	5.232,00
13	Lamongan	4.038,00
14	Tikung	5.299,00
15	Sarirejo	4.739,00
16	Deket	5.005,00
17	Glagah	4.052,00
18	Karangbinangun	5.288,00
19	Turi	5.869,00
20	Kalitengah	4.335,00
21	Karang Geneng	5.132,00
22	Sekaran	4.965,00
23	Maduran	3.015,00
24	Laren	9.600,00
25	Solokuro	10.162,00
26	Paciran	4.789,00
27	Brondong	7.459,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas, peneliti memilih kecamatan sambeng dikarenakan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terbesar dari kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan Sambeng juga memiliki luas wilayah lahan pertanian yang digunakan masyarakat setempat dalam melakukan aktivitas bertani. Adapun data yang peneliti peroleh, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah Penggunaan Lahan Pertanian
di Kecamatan Sambeng
Tahun 2025

No	Nama Desa	Luas Lahan Pertanian
1	Ardirejo	182,55
2	Barujojo	106,31
3	Candisari	246,21
4	Garung	132,30
5	Gempolmanis	164,26
6	Jatipandak	71,97
7	Kedungbanjar	30,24
8	Kedungwangi	201,17
9	Kreteranggon	234,36
10	Nogojatisari	133,08
11	Pamotan	187,67
12	Pasarlegi	141,40
13	Pataan	198,10
14	Sekidang	16,02
15	Selorejo	116,84
16	Semampir	242,29
17	Sidokumpul	226,60
18	Sumbersari	159,36
19	Tenggiring	104,66
20	Wateswinangun	248,26
21	Wonorejo	87,24
22	Wudi	107,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

Dari data diatas, bisa diketahui bahwa Desa Wateswinangun merupakan desa yang memiliki lahan pertanian yang paling luas jika dibandingkan dengan yang lain. Oleh sebab itu, kebutuhan pupuk di Desa Wateswinangun juga sangat banyak, hal tersebut didorong dengan kebutuhan pupuk yang disebabkan oleh luas lahan yang masuk dalam Desa Wateswinangun. Sebab semakin luas lahan pertanian maka semakin banyak juga kebutuhan pupuk

yang diperlukan.

Bertani adalah sumber mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan sambeng, hal itu dibuktikan dari hampir seluruh masyarakatnya terdaftar dalam anggota penerimaan bantuan pupuk subsidi di beberapa poktan (Kelompok Tani) di masing-masing desa. Adapun masing-masing jumlah poktan dan anggota terdaftar di seluruh Desa di Kecamatan Sambeng, sebagai berikut :

Tabel 1.3

**Rekap kelompok tani penerima pupuk bersubsidi dan jumlah anggota
di Kecamatan Sambeng
Tahun 2025**

No	Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota
1	Ardirejo	8	684
2	Barujojo	8	449
3	Candisari	11	832
4	Garung	5	527
5	Gempolmanis	9	751
6	Jatipandak	6	518
7	Kedungbanjar	2	121
8	Kedungwangi	8	634
9	Kreteranggon	10	805
10	Nogojatisari	8	572
11	Pamotan	7	666
12	Pasarlegi	4	375
13	Pataan	10	792
14	Sekidang	5	251
15	Selorejo	8	546
16	Semampir	8	524
17	Sidokumpul	8	716
18	Sumbersari	4	421
19	Tenggiring	5	474
20	Wateswinangun	12	849
21	Wonorejo	3	406
22	Wudi	4	524

Sumber Data: pertanian.go.id

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa desa di Kecamatan Sambeng yang memiliki poktan paling banyak dan jumlah anggota terbanyak adalah Desa Wateswinangun yang memiliki jumlah Poktan (Kelompok Tani) 12 poktan dan 849 anggota yang terdaftar, Desa dengan jumlah Poktan terbanyak setelah Desa Wateswinangun adalah Desa Candisari yang memiliki jumlah Poktan (Kelompok Tani) 11 poktan dan 832 anggota. Sedangkan Desa Kedungbanjar adalah desa yang poktan paling sedikit, dengan jumlah Poktan yang dimiliki hanya 2 Poktan dan 121 anggota.

Peneliti memilih Desa Wateswinangun sebagai objek penelitian. Dikarenakan Desa Wateswinangun merupakan desa yang memiliki lahan pertanian yang paling luas di Kecamatan Sambeng. Desa Wateswinangun juga memiliki kelompok tani terbanyak di Kecamatan sambeng, hal itu dibuktikan banyaknya anggota terdaftar sebagai penerima bantuan pupuk subsidi yang menjadi alasan kenapa kebutuhan pupuk di Desa Wateswinangun sangat banyak. Desa wateswinangun juga memiliki keunggulan dalam sarana dan prasarana seperti memiliki akses irigasi yang lebih baik, memiliki lahan pertanian yang relative datar dan kebanyakan petani sudah menggunakan peralatan pertanian modern sehingga membantu memudahkan para petani dalam mengelola sawah atau lahan pertanian secara maksimal.

Masyarakat Desa Wateswinangun membeli pupuk subsidi di beberapa poktan sesuai dengan tempat dan dimana mereka mendaftar. Adapun untuk poktan di Desa Wateswinangun memiliki 12 poktan yang di bagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Grenjengan, Dusun Sahar, Dusun Tlatah dan Dusun Juwok, berikut rincian dari ke 12 Poktan tersebut beserta nama pemilik dan nama

Poktan, antara lain:

Tabel 1.4
Data Penjual (kelompok tani)
di Desa Wateswinangun
Tahun 2025

No	Nama Pemilik	Nama Poktan
1	Saun	Dadi lancer
2	Andik	Jaya Abadi
3	Hari subagyo	Karya Tani
4	Kusdi	Maju Abadi
5	Suparman	Margo Mulyo
6	Djasman	Sumber Mulyo
7	Djajus	Sumber Tani
8	Milan	Tani Maju
9	Kariono	Tani Mandiri
10	Miyono	Tani Mulyo
11	Saelan	Tani Subur
12	Prpto	Barusemi

Sumber : Hasil Observasi (Kelompok Tani Desa Wateswinangun)

Desa Wateswinangun yang terletak di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, merupakan wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani di desa ini umumnya mengelola lahan sawah dan tegalan dengan komoditas utama padi, jagung, dan kacang-kacangan. Pendapatan petani tergolong fluktuatif dan cenderung rendah, sangat bergantung pada musim tanam dan harga hasil panen yang baik, pendapatan bersih petani berkisar Rp5 Juta hingga Rp10Juta per musim, namun dapat turun drastis saat terjadi gagal panen atau anjloknya harga komoditas.¹⁹

Produktivitas pertanian di Desa Wateswinangun bervariasi, dengan rata-rata hasil panen padi sekitar 5-6 ton per hektar. Namun, hasil ini masih

¹⁹ Desa Wateswinangun, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. "Statistik Penduduk," diakses dari <https://www.wateswinangun.desa.id/index.php/first/statistik/1> pada 4 Juni 2025.

dibawah potensi maksimal karena keterbatasan dalam akses teknologi dan sarana produksi, terutama pupuk. Ketergantungan petani terhadap pupuk, terutama pupuk bersubsidi seperti Urea dan NPK, sangat tinggi. Pupuk menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan hasil panen, sehingga ketersediaannya sangat krusial. Namun, ketergantungan ini juga memunculkan kerentanan, terutama saat terjadi kelangkaan pupuk atau distribusi yang tidak merata.

Petani di Desa Wateswinangun menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola usaha taninya. Selain masalah distribusi pupuk, mereka juga menghadapi harga input produksi yang terus meningkat, keterbatasan modal, dan fluktuasi harga hasil panen. Selain itu, perubahan iklim juga mulai dirasakan dampaknya, dengan pola musim tanam yang tidak menentu yang mempengaruhi produktivitas.

Secara umum, kesejahteraan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan, serta didukung oleh pemenuhan kebutuhan tambahan seperti akses pendidikan, kepemilikan pekerjaan, atau kemampuan untuk menjalankan usaha sendiri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan individu sehingga mampu bersaing secara sosial dan turut berkontribusi dalam perputaran ekonomi.²⁰ Dalam konteks ini, penyaluran sumber daya dan bantuan yang merata menjadi salah satu strategi penting untuk membantu kelompok masyarakat tertentu, seperti petani, dalam meraih tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hubungan antara kesejahteraan dan

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Pertama, 2015), 86.

proses penyaluran sangat erat, karena kesejahteraan merupakan cita-cita setiap individu yang hanya dapat tercapai melalui kerja keras dan dukungan sistem yang adil. Oleh karena itu, langkah penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menjadi wujud perhatian, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup para petani secara menyeluruh. Berikut indikator kesejahteraan beberapa petani di Desa Wateswinangun sebagai penerima bantuan pupuk subsidi dengan penjelasan beberapa tabel. Antara lain:

Tabel 1.5

**Perbandingan Kebutuhan Dengan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
di Desa Wateswinangun
Tahun 2025**

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan	Realisasi (ton)	Presentasi Pemenuhan
1	Urea	28 ton	19,6 ton	70%
2	NPK	34 ton	22,2 ton	60%
4	ZA	-	-	-

Sumber : Kelompok Tani Desa Wateswinangun

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa kebutuhan keseluruhan pupuk bersubsidi sudah berjalan semaksimal mungkin, kurangnya presentasi maksimal 100% juga disebabkan kebutuhan pupuk bersubsidi disetiap daerah di seluruh indonesia yang tinggi, pemerintah memberikan jatah yang berbeda-beda di setiap daerah yang nantinya di alokasikan ke setiap penjuruh wilayah di daerah tersebut. Desa Wateswinangun dalam mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi masih dalam tahap proses yang terbaik dalam pemenuhannya, hal tersebut dibuktikan dengan presentasi pemenuhan diatas 50% yang dikatakan cukup dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Diharapkan pemerintah

khususnya di bidang pertanian sebagai wadah harapan bagi petani di seluruh indonesia memberikan yang terbaik guna memberikan kesejahteraan di setiap warganya dalam bidang pekerjaan apapun, termasuk petani dan buruh tani.

Tabel 1.6

Harga Jual dan Harga Beli Pupuk Subsidi dan Non Subsidi

di Desa Wateswinangun

Tahun 2025

No	Jenis Pupuk	Harga		Selisih Harga
		Non Subsidi	Subsidi	
1	Urea	550 / 50 KG	130 / 50 KG	420
2	NPK	650 / 50 KG	130 / 50 KG	520
3	ZA	295 / 50 KG	-	-

Sumber : Kelompok Tani Desa Wateswinangun

Dari tabel diatas, bisa di lihat perbandingan yang sangat jauh terkait harga pupuk subsidi dan non subsidi. Jika pupuk subsidi dialokasikan dengan sangat baik apalagi sampai bisa mencukupi kebutuhan pupuk petani untuk tanamannya maka akan membantu petani. Masyarakat Desa Wateswinangun bergantung kepada kelompok tani dalam memperoleh pupuk subsidi, mereka mendaftarkan diri sebagai anggota guna untuk mendapat jatah sesuai yang mereka ajukan.

Tabel 1.7

Persepsi Petani Terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Di Desa Wateswinangun

Tahun 2025

No	Kategori	Pernyataan	
		Setuju (%)	Tidak Setuju (%)
1	Pupuk datang tepat waktu	60%	40%

2	Jumlah pupuk mencukupi kebutuhan	70%	30%
3	Penyaluran dilakukan secara adil	70%	30%

Sumber : Survei beberapa petani

Dari hasil survei dengan beberapa petani di Desa Wateswinangun memberikan nilai positif terhadap persepsi penyaluran pupuk bersubsidi, dikarenakan dari ke tiga kategori yang dijadikan titik poin survey dari 10 petani memilih diatas 50% dan alasan tidaknya dikarenakan faktor personal masing-masing.

Tabel 1.8

**Rata-rata Pendapatan Petani
Sebelum dan Sesudah Penyaluran Pupuk Subsidi
di Desa Wateswinangun
Tahun 2025**

Tahun	Sebelum Subsidi	Sesudah Subsidi
2022	Rp.3.450.000 / 30 Hari	Rp.3.800.000 / 30 Hari
2023	Rp.3.500.000 / 30 Hari	Rp.3.850.000 / 30 Hari
2024	Rp.4.000.000 / 30 Hari	Rp.4.400.000 / 30 Hari

Sumber : Petani Desa Wateswinangun

Dari hasil survei diatas menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan petani sebelum dan sesudah memiliki nilai yang berbeda. Tingginya sesudah subsidi sangatlah hal wajar, dikarenakan harga beli pupuk subsidi dan non subsidi relative berbanding terbalik. Perbedaan yang sedikit dari jumlah pendapat sesudah dan sebelum subsidi dikarenakan nilai diatas merupakan pembagian hasil keseluruhan yang dibagi menjadi satu bulan, sedangkan dalam bertani jangka waktu dari musim tanam hingga musim panen memerlukan waktu lebih dari tiga bulan (3,5 bulan).

Tabel 1.9
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) vs Pendapatan Petani
di Desa Wateswinangun
Tahun 2025

Komponen	KHL (Rp)	Pendapatan Petani (Rp)	Total (Surplus/Defisit)
Makanan	Rp.1.350.000	Rp.4.400.000	Surplus
Pendidikan Anak	Rp.1.050.000	Rp.4.400.000	Surplus
Transportasi	Rp.144.000	Rp.4.400.000	Surplus
Total	Rp.2.544.000	Rp.4.400.000	Surplus

Sumber : Petani Desa Wateswinangun

Dari hasil survei dengan beberapa petani di Desa Wateswinangun diatas, dalam mencukupi kebutuhan hidup yang layak yang dibandingkan dengan pendapatan petani di setiap bulannya sangat memberikan nilai baik dikarenakan memiliki nilai surplus dalam setiap komponen, meliputi dalam mencukupi makanan di setiap harinya, pendidikan anak termasuk uang saku dan spp, serta transportasi dalam mendukung berbagai aktivitas sehari hari.

Tabel 1.10
Akses Petani Terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan
di Desa Wateswinangun
Tahun 2025

No	Tahun	Petani Punya BPJS	Anak Petani Sekolah (SD-SMA)	Akses Layanan Pendidikan
1	2022	90%	100%	Bagus
2	2023	60%	100%	Bagus
3	2024	40%	100%	Bagus

Sumber : Petani Desa Wateswinangun

Dari hasil survei diatas, akses petani terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dalam memenuhi syarat orang dikatakan sejahtera cukup baik,

seperti petani yang memiliki BPJS semakin banyak di setiap tahunnya, hal tersebut diukur dari kapan petani itu mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS. Sementara untuk anak petani yang mampu untuk bersekolah dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa dikatakan maksimal, dikarenakan presentasi menunjukkan angka 100%. Untuk akses layanan pendidikan di Desa Wateswinangun di katakan bagus karena mampu memberikan kemudahan setiap warganya untuk mendapatkan kesempatan menggunakan layanan pendidikan termasuk fasilitas yang ada di sekolah.

Tabel 1.11

Persepsi Petani Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Setelah Pupuk Subsidi

di Desa Wateswinangun

Tahun 2025

No	Kategori	Pernyataan	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kebutuhan pokok lebih mudah dipenuhi	100%	0%
2	Beban biaya produksi berkurang	100%	0%
3	Dapat menabung atau investasi kecil-kecilan	30%	70%

Sumber : Petani Desa Wateswinangun

Dari hasil survei diatas, menyebutkan persepsi petani terhadap kesejahteraan keluarga setelah pupuk subsidi memberikan hal baik, terutama dalam mencukupi kebutuhan pokok yang mudah dan beban biaya produksi berkurang dikarenakan harga pupuk yang lebih murah. Sementara dalam menabung atau investasi kecil-kecilan masih belum maksimal dikarenakan pendapatan tiap orang yang berbeda, hal tersebut dapat dibuktikan dengan

kepemilikan lahan pertanian yang beda-beda yang mempengaruhi jumlah hasil panen.

Menurut Linda Ratna Sari, Agus Fahmi.²¹ Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah terbukti mampu menurunkan biaya produksi petani sebesar 14,1% per hektar dan meningkatkan hasil panen dari rata-rata 3,3 ton menjadi 6,4 ton per hektar. Namun, peningkatan ini belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani di Dusun Sudimoro dan Dusun Paritan, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas petani di daerah tersebut hanya memiliki lahan sempit, yakni sekitar 0,25 hektar atau bahkan hanya menyewa 0,5 hektar lahan.

Akibatnya, meskipun pendapatan meningkat karena produktivitas yang lebih tinggi, nilai penghasilan yang diterima oleh petani masih tergolong rendah. Misalnya, petani penyewa lahan 0,5 hektar hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp 15.280 per hari untuk satu keluarga dengan dua anak, sedangkan pemilik lahan 0,25 hektar hanya memperoleh Rp 9.835 per hari. Nilai ini masih berada di bawah standar garis kemiskinan menurut Bank Dunia yang menetapkan ambang kemiskinan sebesar 2 dolar AS atau sekitar Rp 27.200 per orang per hari.

Dengan demikian, meskipun subsidi pupuk membantu meningkatkan hasil pertanian dan efisiensi biaya, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani masih sangat terbatas. Kesejahteraan petani belum meningkat secara signifikan karena keterbatasan skala lahan garapan yang

²¹ Sari, L., R., & Fahmi, A., "Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Kecamatan Megaluh Jombang Dalam Prespektif Fenomenologis (Studi Kasus Dusun Sudimoro dan Dusun Paritan), *Jurnal Bisnis dan Perkembangan Bisnis*, Volume 2, Nomer 2, 86-101.

dimiliki atau disewa oleh petani, sehingga pendapatan tetap rendah dan mereka masih dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siagian et al.²² Kebijakan pemberian pupuk bersubsidi terbukti memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Tapanuli Utara. Dukungan subsidi ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas hasil panen, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani. Dengan adanya akses terhadap pupuk bersubsidi, petani dapat menekan biaya produksi, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk menabung serta mengembangkan modal usaha guna memperluas dan meningkatkan skala pertanian mereka.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana peran penyaluran pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng

²² Siagian, N., Gultom, D. E. M., Pakpahan, D., Sitio, S. R. S., & Siagian, T. M. N. (2023). “Pengaruh pupuk subsidi dan produksi hasil panen terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara”. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(4), 2743-2748.

Kabupaten Lamongan. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem penyalurkan pupuk bersubsidi di Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan peran penyaluran pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti yang berkaitan dengan analisis penyaluran pupuk bersubsidi yang dijalankan pemerintah dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan dijadikan bahan serta menambah wawasan bagi para petani terkait program pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan para petani.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, peneliti sudah menemukan beberapa referensi guna untuk dijadikan rujukan dalam penulisan proposal ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Skripsi karya Elfi Lestari dengan judul “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”.²³ Hasil refrensi penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Penolih menggunakan saluran distribusi tidak langsung yang melibatkan produsen, distributor, kios / pengecer, serta kelompok tani atau petani. Selain itu, ada pengepul dari kelompok tani yang berperan dalam menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Persamaan dari penelitian adalah membahas sistem penyaluran pupuk subsidi yang mempengaruhi kelancaran distribusi dan dampak terhadap kesejahteraan petani. Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah meneliti tentang sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani dengan pendekatan ekonomi islam, berfokus pada kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip prinsip islam.
2. Skripsi karya Aleksandi dengan judul “Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru”.²⁴ Hasil penelitian ini adalah implementasi distribusi pupuk subsidi sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses implementasi, diantaranya, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur

²³ Elfi Lestari, “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi, UIN Purwokerto, 2023).

²⁴ Aleksandi, “implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru” (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023)

birokrasi. Persamaan dengan peneliti adalah fokus penelitian sama-sama membahas distribusi (penyaluran) pupuk subsidi dan dampaknya terhadap petani. Keduanya menyoroti pentingnya ketepatan distribusi dalam mensejahterakan petani. Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah pelaksanaan program pupuk subsidi yang menfokuskan pada implementasi program distribusinya tanpa meneliti dampak terhadap petani.

3. Skripsi karya skripsi karya Diana Dwi Ekasari dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kimia Melalui Sistem Pembayaran Kartu Tani (Studi Kasus di Kelompok Tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo)”.²⁵ Hasil referensi penelitian tersebut membahas tentang hukum islam pada suatu kebijakan yaitu sistem pembayaran jual beli pupuk bersubsidi yang menggunakan kartu tani sebagai alatnya. Persamaan dengan penelitian dari peneliti adalah membahas tentang sistematika jual beli pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian dari peneliti terletak pada rencana lokasi penelitian yang dituju dan permasalahan yang diangkat oleh referensi penelitian tersebut yang lebih mengarah pada pembahasan sistem pembayaran jual beli pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani serta hukum islam yang melekat pada sistem tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian adalah meneliti praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani. Lebih menfokuskan penelitian dalam aspek hukum dan kesesuaian syariah dalam transaksi

²⁵ Diana Dwi Ekasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kimia Melalui Sistem Pembayaran Kartu Tani (Studi Kasus di Kelompok Tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi IAIN Kediri, 2021).

pertanian.

4. Skripsi karya Suciati dengan judul “Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Penggunaan Kartu Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).²⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang peningkatan kesejahteraan petani melalui program penggunaan kartu tani. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dan distribusi dengan tujuan memperhatikan kesejahteraan para petani di desa terkait. Sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian ini mencoba menambahkan nilai lebih melalui sudut pandang ekonomi syariah dan menitikberatkan pada peran kelembagaan petani secara aktif.
5. Skripsi karya Irvan dengan judul “Kepuasan Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”.²⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan petani terhadap pupuk bersubsidi mencapai 51,14, yang berarti petani cukup puas dengan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Persamaan peneliti dengan penelitian ini keduanya sama sama memfokuskan pada pupuk bersubsidi, membahas pupuk bersubsidi dan dampaknya kepada petani. Sedangkan perbedaan penelitian adalah bagaimana petani menilai kualitas, ketersediaan, dan manfaat pupuk

²⁶ Suciati “Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Penggunaan Kartu Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).” (Skripsi IAIN Kediri, 2023).

²⁷ Irvan, “Kepuasan Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko” (Skripsi Universitas Dahesan Bengkulu, 2023).

bersubsidi tanpa mengetahui dampak dari adanya pupuk subsidi tersebut